



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUPARMIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **281801**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.001.160.000

1. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 50.800.000
3. Bangunan Seluas 95 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 7060 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 2815 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL
SENDIRI Rp. 563.000.000
6. Tanah Seluas 1630 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 407 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 36.360.000
9. Tanah Seluas 2521 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 206.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 288.000.000



1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MB. PENUMPANG/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.225.486
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.337.385.486
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.337.385.486

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.